



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**



**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2012-2014)**

Oleh: **YOLI OKTAFIANI SARI**
1210532086

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi*

Universitas Andalas

PADANG

2016

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya mahasiswa Universitas Andalas yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : YOLI OKTAFIANI SARI
No. BP : 1210532086
Program Studi : AKUNTANSI
Fakultas : EKONOMI
Jenis Tugas Akhir : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Andalas hak atas publikasi *online* Tugas Akhir saya yang berjudul:

**Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2012-2014)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Universitas Andalas juga berhak untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, merawat, dan mempublikasikan karya saya tersebut di atas selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di Padang
Pada tanggal 31
Oktober 2016
Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yoli Oktafiani Sari', is written over the printed name.

(Yoli Oktafiani Sari)

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : YOLI OKTAFIANI SARI
No. BP : 1210532086
Program Studi : Strata Satu (S-1)
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul : Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014)

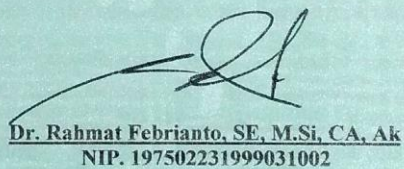
Telah disajikan dan disetujui skripsi ini melalui seminar hasil yang diadakan pada tanggal 5 Agustus 2016 sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan kelaziman yang berlaku.

Padang, 26 Oktober 2016

Kepala Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi


Verji Juita, SE, M.Com (Adv), Ak, CA
NIP. 197906182002122004


Dr. Rahmat Febrianto, SE, M.Si, CA, Ak
NIP. 197502231999031002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'amin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan kaunia-Nya yang senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014) “** ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program S-1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah terlibat dan berkontribusi memberikan bantuan, nasehat, dukungan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini maupun selama penulis mengikuti pendidikan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua, Ayah Octomikanora dan Ibu Roslaini. Terimakasih pamaatas semua pengorbanan, cinta dan kasih sayang yang tidak akan bisa terbalas oleh apapun. Terima kasih juga untuk Iyang Yelsi Sulfiana yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis.
2. Bapak Dr. Harif Amali Rivai, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakutas Ekonomi Universitas Andalas.

4. Bapak Firdaus, SE, M.Si, Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
5. Ibu Rayna Kartika, SE, M.Com, Akt selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan masukan dan nasehat kepada penulis selama kuliah.
6. Bapak Dr. Rahmat Febrianto, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing dan banyak membantu dalam memberikan nasehat dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Ibu Dra. Nini Syofriyeni, M.Si, Ak selaku penelaah skripsi yang telah memberikan saran yang bermanfaat bagi penulis sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Akuntansi Universitas Andalas terimakasih atas ilmu dan nasehat yang bermanfaat yang diberikan dengan tulus dan ikhlas dari awal perkuliahan hingga akhir.
9. Kepada pegawai Biro Jurusan Akuntansi, Da Ari dan Ni Epa yang telah banyak membantu dalam mengurus segala berkas-berkas penulis serta pegawai dekanat dan ICT Fakultas Ekonomi. Terima kasih banyak, mohon maaf apabila penulis ada salah ucapan dan perbuatan, baik disengaja maupun tidak.
10. Teman hidup (Ading, Ciul, Popo, Aim, Ayak, Adek, Oqi). Alhamdulillah complete guys. Terima kasih untuk selalu ada sampai saat ini. Walaupun jauh di mata namun selalu dekat di hati {}.

11. Untuk kesayangan Dadar, Suyun, Mira, Cakur, Ola, Codoik, Iis <3.

Terima kasih telah memberikan warna di masa-masa perkuliahan. Pasti bakalan merindukan moment-moment kebersamaan kita. Mulai dari tidur bareng, kuliah bareng, organisasi bareng, brevet bareng, pokoknya kemana-mana deh, walaupun kadang-kadang tidak lengkap, tapi sebagian dari waktu kita, kita habiskan bersama. Walaupun kebersamaan ini tidak akan selamanya, berharap kita memiliki kenangan di hati masing-masing. Sukses genk untuk kedepannya. Semoga semua impian dan cita-cita kita bisa tercapai. Amiin{ }.

12. My sister from another mother, Rezi Marva Dona S.Si. Kita banyak kesamaan makanya awet dan akur-akur aja. Percaya nggk kami nggak pernah berantam hehehe. Kita selalu saling support, saling menasehati, saling curhat bareng dalam segala hal. Terima kasih ji untuk lebih kurang empat tahun kebersamaan kita. Mulai dari asrama sampai ngekos juga bareng. Pasti bakalan rindu sekali.

13. Orang-orang luar biasa Pengurus Kopma Unand 2015/2016 (Yoga, Mira, Rifky, Iar, Suyun, Masded, Didip, Nadia). Terima kasih atas kebersamaan kita baik di kepengurusan maupun di dunia nyata wkwkw. Beruntung bisa mengenal kalian. Banyak sekali pengalaman dan pelajaran yang didapatkan dan moment- moment suka duka yang berlinangan air mata semoga selalu terkenang. Jangan ada drama diantara kita yaa.. Upsss (insiden spaghetti :D)

14. Housemater's (Rifky, Rizka, Oom, Imel, Nirwan, Venny, Wulan, Indri, Yoni, Rendi) yang katanya royal tapi perhitungan (hahaha) yang kalau udah ngumpul suaranya sampai dimana-mana yang nggak pernah serius walaupun udah dimarahin, obat stres, obat galau obat dari segala obat mungkin hahaha. Thanks for all, bahagia bisa mengenal kalian { }.
15. Abang dan kakak Senior Kopma Unand (Kak ipah, Kak uwa, Bg Robby, Bg Yovi, Da Ap, Bg Sultan, Kak Caca, Bg Aza, Bg Nanda, Alm Bg Amber, Bg Belli, Kak Ujik, Bg Iki, Kak Ani) yang telah banyak memberikan pengalaman, masukan dan nasehat yang berharga selama di Kopma.
16. Untuk Kopma Unand Members Ica Prisma, Mike, Cici, Lina, Ely, Ridha, Nek Selly, Ca Bohay, Yaya, Najla, Roza, Zahra, Waldi langang, Alan jo, Rimo, Raffi, Irsyad, Heru, Tiara Rahmi, Amaik, Igan, Bg Ipul, Rio, Wahyu, Tiara Sonita, Ica Jessica, Wulan Wayu, Sri Ratu, Yessi, Eko dan untuk seluruh Kopma Family yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kebersamaannya.
17. Teman-teman Akuntansi 2012. Terima kasih telah menjadi bagian dari kisah klasik selama perkuliahan.

Akhir kata, penulis berharap segala kebaikan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT. Penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak.

Padang, 26 Oktober 2016



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yoli Oktafiani Sari".

Yoli Oktafiani Sari

1210532086

	No Alumni Universitas	YOLI OKTAFIANI SARI	No Alumni Fakultas
<p style="text-align: center;">BIODATA</p> <p>a). Tempat/Tgl Lahir: Padang Panjang, 24 Oktober 1993 b). Nama Orang Tua: Octomikanora dan Roslaini c). Fakultas: Ekonomi d). Jurusan: Akuntansi e). No Bp: 1210532086 f). Tanggal Lulus: 24 Oktober 2016 g). Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: 3,29 i). Lama Studi: 4 Tahun 2 Bulan j). Alamat Orang Tua: Jorong Kubu Karambia Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar.</p>			
<p style="text-align: center;">Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014)</p> <p style="text-align: center;">Skripsi oleh: Yoli Oktafiani Sari Pembimbing: Dr. Rahmat Febrianto, SE, M.Si, CA, Ak</p> <p style="text-align: center;">ABSTRACT</p> <p>The purpose of this study was to test the influence of Corporate Governance on Tax Avoidance. Corporate Governance is proxied by Ownership Institutional, Porportion of Independent Commisioners Board, Audit Quality and audit Commitee. Secondary data used in this study were collected from the manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange periode of 2012-2014 by using purposive sampling technique. In order to test hipoteses, the study performed linear regretion analysis.</p> <p>The result of the analysis found the Institutional Ownweship and Porportion of Independent Commissioners Board has no significant effect on Tax Avoidance. Audit Quality statistically have a relationship with the Tax Avoidance and Audit Commitee have significant effect on Tax Avoidance.</p> <p>Keywords : Tax Avoidance, Corporate Governance, Ownership Institutional, Porportion of Independent Commisioners Board, Audit Quality and audit Commitee</p>			

ABSTRAK



Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. Tata Kelola Perusahaan diproksikan dengan Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 dengan menggunakan metode purposive sampling sebagai teknik penarikan sampel. Untuk pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear.

Hasil analisis menemukan bahwa Kepemilikan Institusional dan Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Kualitas Audit secara statistik mempunyai hubungan dengan Penghindaran Pajak dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci :Penghindaran Pajak, Tata Kelola Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit.



Skripsi ini telah dipertahankan di depan seminar hasil skripsi dan dinyatakan lulus pada tanggal 5 Agustus 2016 dengan pembimbing dan penguji:

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Dr. Rahmat Febrianto, SE, M.Si, CA, Ak	Dra. Nini Syofriyeni, M.Si, Ak

Mengetahui:

Ketua Program Studi Akuntansi: Verni Juita, SE, M.Com (Adv), Ak, CA
NIP. 197906182002122004



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat nomor alumnus:

Petugas Fakultas / Universitas		
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

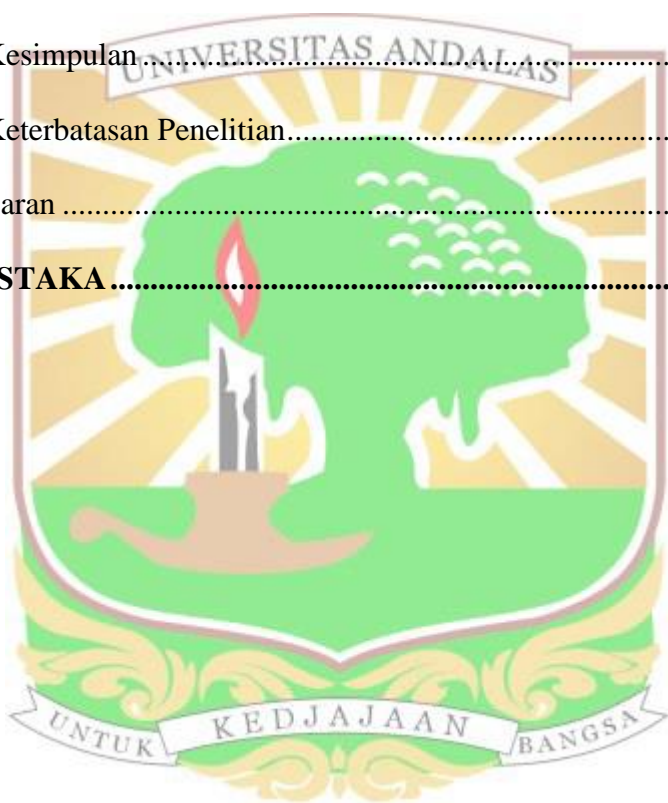
DAFTAR ISI

halaman

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
LEMBAR PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teoritis.....	11
2.1.1 Tax Avoidance.....	11
2.1.2 Corporate Governance	12
2.1.3 Kepemilikan Institusional.....	13
2.1.4 Dewan Komisaris Independen.....	14
2.1.5 Kualitas Audit.....	15
2.1.6 Komite Audit	15

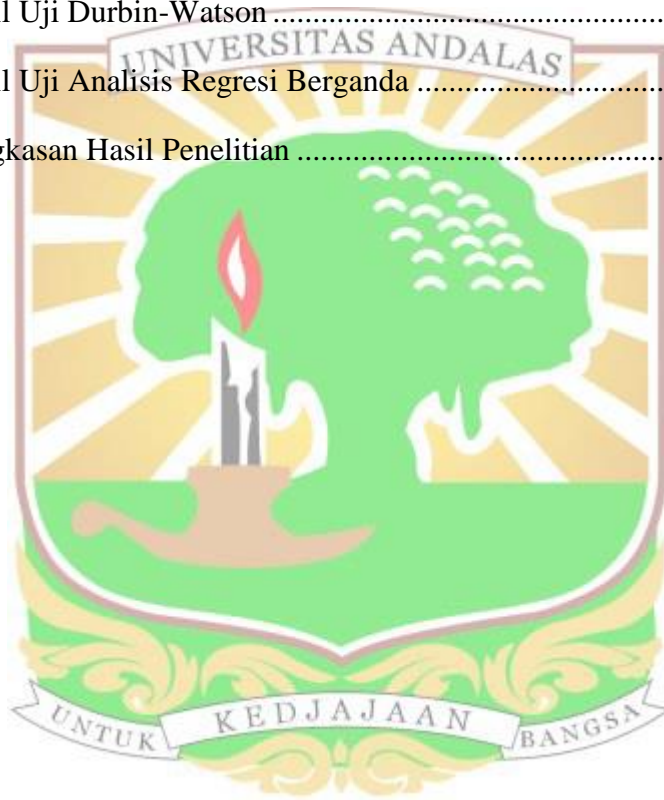
2.2	Penelitian Terdahulu	17
2.3	Kerangka Berfikir	19
2.4	Pengembangan Hipotesis	20
2.4.1	Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak	20
2.4.2	Pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.....	21
2.4.3	Pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak	22
2.4.4	Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.....	22
BAB III	METODE PENELITIAN.....	24
3.1	Desain Penelitian	24
3.2	Populasi dan Sampel Penelitian.....	24
3.3	Variabel Penelitian dan Pengukuran.....	25
3.4	Metode Analisis	27
3.4.1	Statistik Deskriptif.....	28
3.4.2	Uji Asumsi Klasik	28
3.4.3	Uji Hipotesis.....	30
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	32
4.2	Analisis Hasil Statistik Deskriptif.....	33
4.3	Hasil Uji Asumsi Klasik	35
4.3.1	Uji Normalitas	35
4.3.2	Uji Multikolinearitas	37
4.3.3	Uji Heterokedastisitas.....	37
4.3.4	Uji Autokorelasi	39

4.4	Analisis Regresi Berganda.....	39
4.5	Hasil Uji Hipotesis.....	42
4.5.1	Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R ²)	42
4.5.2	Hasil Uji F	42
4.5.3	Hasil Uji t	43
4.6	Pembahasan	44
BAB V	PENUTUP.....	48
5.1	Kesimpulan.....	48
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	49
5.3	Saran	49
DAFTAR PUSTAKA		51



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2012-2014.....	1
Tabel 4.1 Proses Penentuan Sampel.....	33
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif.....	34
Tabel 4.3 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov.....	37
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	38
Table 4.5 Hasil Uji Durbin-Watson	40
Tabel 4.6 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda	41
Tabel 4.7 Ringkasan Hasil Penelitian	45



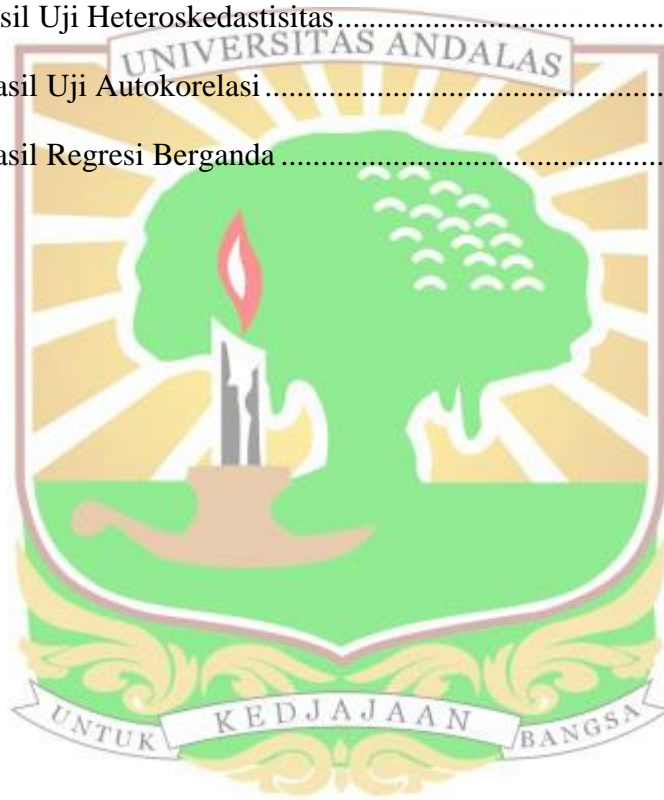
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Normal P-Plot.....	37
Gambar 4.2 Diagram Scatterplots	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sampel Penelitian	56
Lampiran 2 Statistik Deskriptif	58
Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas	59
Lampiran 4 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	60
Lampiran 5 Hasil Uji Multikolinearitas	61
Lampiran 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	62
Lampiran 7 Hasil Uji Autokorelasi	63
Lampiran 8 Hasil Regresi Berganda	64



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Pajak yang dipungut oleh negara difungsikan sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah dan difungsikan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011).

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2012-2014

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rp T)	Realisasi	
		Penerimaan (Rp T)	%
2012	1.016	981	96,4
2013	1.148	1.077	93,8
2014	1.246	1.143	91,7

Sumber : *Okezone.com*

Penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, namun dalam pencapaian target APBN setiap tahunnya tidak pernah tercapai. Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat penerimaan pajak dari tahun 2012 sampai 2014 mengalami peningkatan. Tahun 2012 target penerimaan pajak sebesar 1.016 triliun sedangkan realisasinya sebesar 981 triliun atau sebesar 96,4 %. Tahun 2013 target penerimaan pajak sebesar 1.148 triliun sedangkan realisasinya sebesar 1.077 triliun atau sebesar 93,8 % dan tahun 2014 target penerimaan pajak sebesar 1.246 triliun dan

realisasinya sebesar 1.143 triliun atau sebesar 91,7%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia masih belum bisa dicapai secara maksimal, walaupun penerimaan pajak dari tahun ke tahun meningkat tapi dalam realisasinya tidak pernah melampaui target yang telah ditentukan. Adapun salah satu penyebabnya adalah kesadaran wajib pajak yang masih kurang.

Pajak dalam perusahaan mendapatkan perhatian yang cukup signifikan. Bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan, sehingga sebisa mungkin perusahaan berusaha membayar pajak serendah mungkin. Dalam manajemen pajak terdapat beberapa fungsi manajemen pajak terdiri dari perencanaan pajak (*tax panning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahapan perencanaan dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya agar dapat memilih tindakan penghematan pajak yang dilakukan perusahaan. Salah satu strategi perencanaan pajak (*tax planning*) adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu cara mengurangi pajak secara legal. Praktik penghindaran pajak biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum (*loophole*) dan tidak melanggar hukum perpajakan (Suandy,2001).

Penghindaran pajak yang dilakukan tersebut dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara sektor pajak. Menurut Budiman dan Setiyono (2012), persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi diperbolehkan akan tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan.

Pada tahun 2005 menurut Bappenasterdapat 750 perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang ditengarai melakukan penghindaran pajak di Indonesia dengan melaporkan rugi dalam waktu lima tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). Berdasarkan data pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya. Perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama tujuh tahun berturut-turut. Kasus serupa juga terjadi di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yakni dengan membayar pajak kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yg dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyreng et al, 2008).

Desai dan Dharmapala (2006) menyatakan bahwa perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Dyreng et al (2010) memperoleh hasil bahwa pimpinan perusahaan (*executive*) secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Dalam penelitian Desai dan Dharmapala (2006) menemukan bahwa hubungan antara kompensasi insentif dengan tindakan penghindaran pajak bersifat negatif. Hubungan negatif ini lebih banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat tata kelola perusahaan (*corporate governance*) rendah, yang dalam pengelolaan perusahaan sifat oportunistik manajer diduga merupakan faktor yang dominan. Menurut Haruman (2008), tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dalam perusahaan akan menentukan arah kinerja perusahaan. Ketika suatu perusahaan telah menerapkan *corporate governance* dengan baik, maka akan tercipta kinerja perusahaan yang lebih efektif dan berdampak pada keputusan yang efektif dalam menentukan kebijakan yang

terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sartori (2010) menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Good corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, dan para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka dengan tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi pihak-pihak pemegang kepentingan. *Isu corporate governance* mulai berkembang pada tahun 1998, ketika di Indonesia mengalami krisis moneter. Banyak pihak yang menyatakan pendapatnya bahwa lamanya proses pemulihan krisis di Indonesia disebabkan oleh lemahnya *corporate governance* yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) merupakan sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara pihak manajemen dengan pemilik baik yang memiliki saham mayoritas maupun minoritas di suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) berguna untuk melindungi investor dari adanya perbedaan kepentingan pemegang saham (*principle*) dengan pihak manajemen (*agent*). Masalah dalam *corporate governance* terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Dewan komisaris yang berperan

sebagai agendalam suatu perusahaan diberi wewenang untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik, namun agen tersebut memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank (Dewi dan Jati, 2014). Karena adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik instusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Pada pengungkapan suka rela menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat dan optimis (Khurana ,2009).

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit (Dewi dan Jati ,2014). Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah transparansi yang merupakan salah satu unsur dari good corporate governance. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori , 2010). Karena asumsi adanya implikasi dari perilaku pajak yang agresif, perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya.

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (*relevant dan realialible*). Oleh karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau Shareholders dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda (Linda, Lilis dan Nuraini ,2011).

Penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan (*corporate governance*) terhadap penghindaran pajak(*tax avoidance*) telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya namun penelitian mengenai ini masih tergolong minim di Indonesia. Hasil penelitiannya pun masih beragam. Hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menunjukkan tidak ada pengaruh kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Namun, Maharani dan Suwardana (2014) dan Prakoso (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara dewan komisaris independen dengan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Darmayanti dan Susanto (2015) menemukan tidak ada pengaruh komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*

sedangkan Maharani dan Suardana (2014) menyatakan bahwa komite audit dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian mengenai *corporate governance* dan *tax avoidance* ini masih menarik untuk diteliti kembali mengingat masih beragamnya hasil penelitian sebelumnya dan diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan variabel independen yaitu tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dengan proksi kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit serta variabel kontrol yaitu ROA dan ukuran perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
2. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuann yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Mengetahui secara empiris pengaruh proporsi dewan independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
3. Mengetahui secara empiris pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
4. Mengetahui secara empiris pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan sebagai bahan referensi dan masukan pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan khususnya mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) serta dapat menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Sebagai sarana berlatih dalam mengembangkan kemampuan pada bidang penelitian dan sarana evaluasi di bidang akademik untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan serta penerapan teori yang telah diperoleh selama kuliah dan untuk menambah pengetahuan mengenai tata kelola

perusahaan (*corporate governnace*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

b. Bagi manajemen perusahaan

Dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat mencegah perusahaan terjerumus dalam lingkaran ambiguitas yang terdapat dalam peraturan perpajakan antara kegiatan legal maupun ilegal dalam perencanaan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat landasan teoritis yang mendukung penelitian ini serta penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga berisi tentang kerangka pemikiran dan hipotesis penetian.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini memuat desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengukuran variabel serta teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas dan menganalisis bagaimana pengaruh tata kelola perusahaan (*corporate governance*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Ban V : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan yang diperbolehkan atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan (Dyrenge, et. al, 2008).

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2008). Suandy (2008) memaparkan beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, antara lain:

- a. Jumlah pajak yang harus dibayar.

Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran;

- b. Biaya untuk menyuap fiskus.

Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran;

- c. Kemungkinan untuk terdeteksi

Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran; dan

- d. Besar sanksi

Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan. Istilah yang sering digunakan adalah *tax evasion* dan *tax avoidance*. Lumbantoruan dalam bukunya akuntansi pajak (1996: 489) memaparkan definisi terkait dua istilah tersebut. *Tax evasion* (penggelapan pajak) adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

2.1.2 Corporate Governance

Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* pada tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut pada laporan mereka (*Cadbury Report*). Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang sangat menentukan bagi praktik *corporate governance* di seluruh dunia.

Menurut *Cadbury Committee* (1992), pengertian *corporate governance*

adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.

Corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (FCGI, 2001).

Good corporate governance (GCG) menurut komite nasional kebijakan (KNKG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. KNKG (2006) mengeluarkan *code of good corporate governance*, dimana terdapat lima prinsip yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan, yaitu meliputi lima prinsip yaitu transparansi (transparency), kemandirian (independency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kewajaran (fairness).

2.1.3 Kepemilikan Institusional

Setiap perusahaan masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri oleh karena itu perusahaan harus bisa mencegah terjadinya konflik antara pihak-pihak tersebut yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu adanya monitor dari pihak luar untuk memantau masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pihak luar yang dimaksud adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang

dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak.

2.1.4 Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait.

Pada Bursa Efek Indonesia terdapat aturan yaitu bahwa sebuah perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris independen, dengan demikian pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa (Pohan, 2008). Semakin tinggi persentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan tax avoidance dapat semakin rendah. Dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah persentase

dewan komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga kebijakan tax avoidance semakin tinggi.

2.1.5 Kualitas Audit

Audit merupakan elemen penting dalam *corporate governance* yang erat kaitannya dengan salah satu prinsip *corporate governance* yaitu transparansi. Perusahaan publik semakin menuntut adanya transparansi pada laporan keuangan. Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan.

Jika nominal pajak yang harus dibayar terlalu tinggi biasanya akan memaksa perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak, maka semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Chai dan Liu, 2010).

2.1.6 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.

Komite audit merupakan komponen penting yang harus ada pada perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia, oleh karena itu Bursa Efek

Indonesia mengharuskan membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya.

Tugas dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Dengan kata lain komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan. Dengan adanya hal tersebut maka, komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga akan mengurangi juga tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum lainnya (Siallagan dan Machfoez, 2006). Semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin tinggi.

Bursa efek Indonesia (BEI) mensyaratkan dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit bertugas melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan (Mayangsari, 2003). Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada

perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung *good corporate governance*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh tata kelola perusahaan (*corporate governance*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), telah dilakukan oleh Bovi (2005); Friese, et al., (2006); Sartori (2010); Chen dan Chu (2010); Chai dan Liu; Kim, et al., (2010); dll. Sejumlah penelitian di luar negeri menunjukkan bahwa *corporate governance* yang efektif berpengaruh negatif pada aktivitas *tax avoidance*.

Annisa dan Kurniasih (2012) meneliti tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa secara statistik terbukti tidak terdapat pengaruh signifikan kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen dan dewan komisaris terhadap *tax avoidance*. Semakin besar persentase variabel dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan menuntut manajemen bekerja lebih efektif dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan oleh direksi dan manajer, sehingga keberadaan mereka tidak hanya menjadi simbol semata. Hasilnya kenaikan persentase dewan komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris secara keseluruhan tidak signifikan mempengaruhi kebijakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Sedangkan komite audit dan kualitas audit terbukti terdapat pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Prakoso (2013) menyimpulkan bahwa model penelitian penghindaran pajak dengan variabel profitabilitas, kepemilikan keluarga, komisaris independen, komite audit, leverage, ukuran perusahaan dan kompensasi kerugian pajak menunjukkan

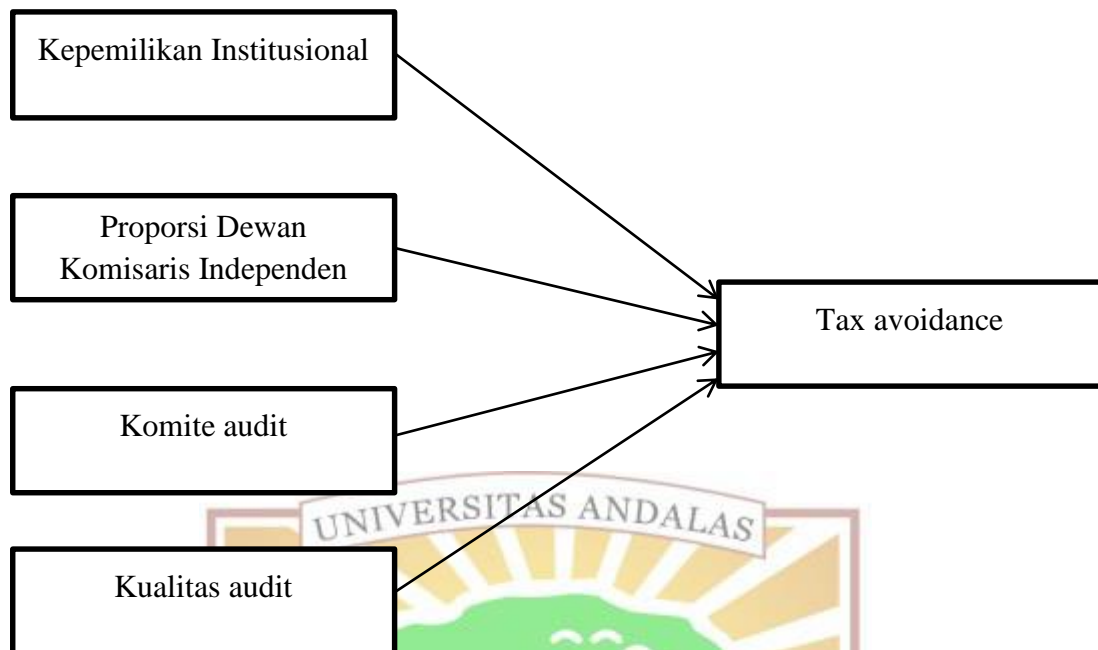
model yang relatif baik karena dari variabel-variabel tersebut mampu menjelaskan sebesar 63,9% terjadinya penghindaran pajak. Tujuh hipotesis yang diajukan hanya ada tiga hipotesis yang terbukti didukung data. Empat hipotesis lainnya tidak didukung oleh data yaitu komite audit, leverage, ukuran perusahaan, dan kompensasi kerugian pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan komisaris independen merupakan variabel yang secara statistik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas perusahaan merupakan variabel yang berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal diduga karena tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun. Winata (2013) menemukan bahwa *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional, dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan prosentase dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Maharani & Suardanana (2014) meneliti tentang pengaruh *corporate governance*, profitabilitas dan karakteristik eksekutif menyimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit yang merupakan proksi dari *corporate governance* dan ROA yang merupakan proksi dari profitabilitas berpengaruh negatif, risiko perusahaan yang merupakan proksi dari karakteristik eksekutif berpengaruh positif, sedangkan sisanya yaitu kepemilikan insitusional yang merupakan proksi dari *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012.

Damayanti dan Susanto (2015) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena jumlah komite audit yang berada di dalam perusahaan tidak memberikan jaminan perusahaan akan melakukan tindakan *tax avoidance* dan jumlah komite audit tidak memberikan jaminan dapat melakukan intervensi dalam peran penentuan kebijakan besaran tarif pajak dalam perusahaan. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. KAP The Big Four memiliki banyak pengetahuan tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan sehingga tidak menjamin KAP yang memiliki reputasi yang baik tidak akan melakukan kecurangan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pemilik institusional kurang peduli dengan citra perusahaan asalkan perusahaan tersebut bisa memaksimalkan kesejahteraan pemilik institusional walaupun adanya perilaku manajemen dalam mengambil suatu keputusan terutama dalam hal pajak yaitu dalam tindakan *tax avoidance*.

2.3 Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini akan diteliti tentang pengaruh tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian menggunakan dua variabel kontrol yaitu ROA dan size (ukuran perusahaan).



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Dalam setiap perusahaan masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri oleh karena itu perusahaan harus bisa mencegah terjadinya konflik antara pihak-pihak tersebut yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu adanya monitor dari pihak luar untuk memantau masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pihak luar yang dimaksud adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khuranadan Moser (2009) menemukan besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan berpengaruh secara negatif terhadap kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan

semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholder* institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan *long-term shareholder* maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif. Selain itu hasil penelitian Irawan dan Aria (2012) menemukan bahwa kepemilikan saham institusi berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dibangun adalah:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.4.2 Pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak

Dewan komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait.

Pada Bursa Efek Indonesia terdapat aturan yaitu bahwa sebuah perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris independen (Pohan, 2008). Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen. Oleh karena itu, independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah proporsi dewan komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen. Oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga

kebijakan *tax avoidance* semakin tinggi. Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut.

H2: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.4.3 Pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak

Audit merupakan elemen penting dalam *corporate governance* yang erat kaitannya dengan salah satu prinsip *corporate governance* yaitu transparansi. Perusahaan publik semakin menuntut adanya transparansi pada laporan keuangan.. Penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menyimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut Chai dan Liu (2010), jika nominal pajak yang dibayar terlalu tinggi biasanya akan memaksa perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak. Oleh sebab itu semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut.

H3 : Kualitas audit diduga mempunyai hubungan dengan penghindaran pajak

2.4.4 Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.

Komite audit merupakan komponen penting yang harus ada pada perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu Bursa Efek

Indonesia mengharuskan membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin tinggi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut.

H4 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Berdasarkan karakteristik masalah, jenis penelitian ini merupakan rancangan penelitian kausalitas yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh antarvariabel dependen dengan variabel independen. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh antara variabel independen yaitu tata kelola perusahaan (*corporate governance*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2014. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive sampling*. Metode ini dipilih peneliti karena dianggap memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Adapun beberapa kriteria sampel penelitian antara lain:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2012-2014 secara berturut-turut.
2. Perusahaan yang menyajikan informasi keuangan lengkap dan laporan tahunan lengkap (*annual report*) berupa informasi mengenai komposisi saham beredar, jumlah dewan komisaris, komite audit, dan nama KAP yang mengaudit.

3. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah, agar kriteria pengukuran mata uangnya sama.
4. Perusahaan tidak mengalami kerugian dalam tahun pengamatan agar memudahkan dalam penghitungan penghindaran pajak menggunakan *cash ETR*.
5. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan dan laporan keuangan auditan perusahaan tahun 2012-2014 yang telah dipublikasikan secara lengkap di www.idx.co.id dan website masing-masing perusahaan.

3.3 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Chen et al., (2010) menghitung *tax avoidance* dengan proksi *cash ETR* (*cash effective tax rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin besar *cash ETR* ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Current Tax Paid}}{\text{Pre - Tax Income}}$$

Variabel Independen

a. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional dinyatakan dalam presentase yang diukur dengan membagi kepemilikan saham institusional dengan total saham beredar.

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{Kepemilikan saham institusional}}{\text{Total saham beredar}}$$

b. Proporsi dewan komisaris Independen

Proporsi dewan komisaris independen diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel tahun amatan. Syarat

$$\text{Proporsi dewan komisaris} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Total komisaris}}$$

c. Komite Audit

Variabel komite audit diukur dengan jumlah total anggota komite dalam suatu perusahaan (Hanum dan Zulaikha, 2013). Dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota diangkat serta diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

d. Kualitas Audit

Kualitas audit diukur dengan menggunakan variable dummy yang bernilai 1 apabila audit laporan keuangan dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP) *The Big Four* yaitu PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche

Tohmatsu, KPMG, dan Ernst & Young, dan bernilai 0 apabila audit laporan keuangan tidak dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP) *The Big Four*.

Pada penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu : ROA dan ukuran perusahaan.

3.4 Metode Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan model alat analisis regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak IBM *Statistical Package for Social Sciences (SPSS)* versi 20.

Rumus persamaan regresi yang digunakan adalah

$$\text{Cash ETR} = \beta_0 + \beta_1 \text{KI} + \beta_2 \text{PDKI} + \beta_3 \text{KuA} + \beta_4 \text{KoA} + \beta_5 \text{ROA} + \beta_6 \text{SZE} + \varepsilon$$

Keterangan:

Cash ETR : Cash effective tax rate

β : Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien Regresi

KI : Kepemilikan Institusional

PDKI : Komisaris Independen

KuA : Komite Audit

KoA : Kualitas Audit

ROA : Return On Assets

SZE : Ukuran Perusahaan

ε : Faktor Pengganggu

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata, standar deviasi, variance, maksimum, minimum, kurtosis, skewnes (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2005). Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Statistik deskriptif digunakan untuk mengembangkan profil perusahaan yang menjadi sampel statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan dan peningkatan data, serta penyajian hasil peningkatan tersebut (Ghozali, 2011).

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus di penuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikoloniaritas, dan heterokidastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari :

3.4.2.1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid

untuk jumlah sampel kecil. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik terbesar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2011).

3.4.2.2. Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah di dalam model analisis regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam regresi dapat dilihat dari: (1) *tolerance value*, (2) nilai *variance inflation factor* (VIF). Model regresi yang bebas multikolinieritas adalah yang mempunyai nilai *tolerance* di atas 0,1 atau VIF di bawah 10 (Ghozali, 2011). Apabila *tolerance variance* di bawah 0,1 atau VIF di atas 10, maka terjadi multikolinieritas.

3.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan grafik Scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Apabila nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan lima persen dan grafik Scatterplot, titik-titik menyebar di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

3.4.2.4. Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengguna pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (Ghozali, 2011). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW), dimana hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai *Durbin-Watson* (DW).

3.4.3 Uji Hipotesis

3.4.3.1 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien

determinasi adalah antara nol dan satu. Penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R²* karena mampu mengatasi bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi. Nilai *Adjusted R²* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel-variabel terikat sangat terbatas (Ghozali, 2011).

3.4.3.2 Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0,05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Hal ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel bebas. Jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel terikat (Ghozali, 2011).

3.4.3.3 Uji t

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0,05. Jika nilai probabilitas signifikansi $< \alpha$, maka dikatakan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai probabilitas signifikansi $> \alpha$, maka dikatakan variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Observasi dan pengamatan telah dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Jumlah populasi sebesar 142 perusahaan dengan periode pengamatan sebanyak 3 tahun (2012-2014). Pengamatan pada objek penelitian dilakukan dengan meneliti laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2012-2014. Proses pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Proses Penentuan Sampel

Kriteria	Jumlah Perusahaan
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014	142
Perusahaan yang mengalami kerugian tahun 2012-2014	(40)
Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam rupiah	(29)
Perusahaan dengan data tidak lengkap	(16)
Jumlah perusahaan yang dianalisis	57
Jumlah observasi 57 x 3 tahun	171

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel di atas dapat dilihat bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014 ada 142 perusahaan. Perusahaan yang mengalami kerugian dalam tahun pengamatan dan yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam rupiah dikeluarkan dari sampel. Begitu juga pada perusahaan yang tidak memiliki data yang lengkap juga dikeluarkan dalam sampel penelitian. Jadi total perusahaan pada sektor manufaktur yang dijadikan

sampel penelitian sebanyak 57 perusahaan selama tiga tahun dengan total observasi 171.

4.2 Analisis Hasil Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai *mean*, dan deviasi standar dari masing-masing variabel. Berikut ini dijelaskan hasil statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS ANDALAS

Tabel 4.2

Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minumum	Maksimum	Mean (Modus)	Dev. Satndar
Cash ETR	171	0,1009	0,4868	0,2488	0,0434
KI	171	0,1438	0,9975	0,5791	0,2316
PDKI	171	0,2000	0,8000	0,3799	0,1009
KuA	171	0,0000	1,0000	0,0000	0,4386
KoA	171	3,0000	5,0000	3,0000	0,4417
ROA	171	0,0000	0,6572	0,1196	0,1010
SIZE	171	25,2767	33,0950	28,3335	1,6969

Keterangan :
 Cash ETR = cash effective tax rate; KI=kepemilikan institusional;
 PDKI=proporsi dewan komisaris independen; KuA = kualitas audit; KoA = komite audit; ROA=*return on asset*; SIZE = ukuran perusahaan

Kolom N pada Tabel 4. 2 menunjukkan jumlah data yang digunakan yaitu sebanyak 171 data yang valid. Pada variabel *tax avoidance (cash ETR)*, nilai

minimumnya adalah sebesar 0,1009 dan nilai maksimumnya sebesar 0,4868. Nilai *mean* sebesar 0,2486, hasil ini menunjukkan bahwa tingkat perilaku penghindaran pajak pada perusahaan sampel yang terpilih sebesar 24,88 %. Hal ini tidak jauh berbeda dengan tarif pajak badan yaitu 25%.

Variabel kepemilikan institusional (KI) , nilai minimumnya adalah 0,1438 dan nilai maksimum sebesar 0,9975. Nilai *mean* sebesar 0,5791 dapat diartikan bahwa rata-rata kepemilikan saham institusional pada sampel yang diteliti sebesar 57,41 % dari jumlah saham yang beredar atau yang diterbitkan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional terendah adalah PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk dan perusahaan dengan kepemilikan saham institusional tertinggi adalah PT. Tunas Alfin, Tbk.

Variabel proporsi dewan komisaris independen (PDKI) ditemukan adanya perusahaan sampel yang terpilih belum memenuhi ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu sekurang kurangnya 30 % dari jumlah komisaris keseluruhan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai minimumnya sebesar 0,2000 atau sebesar 20%.

Variabel kualitas audit (KuA) memiliki nilai modus yaitu 0. Variabel ini merupakan variabel dummy, sampel yang diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) *The Big Four* diberi nilai 1 dan yang tidak diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) *The Big Four* diberi nilai 0, dimana dari 171 sampel yang diamati terdapat sebanyak 75 data observasi diaudit oleh Kantor akuntan Publik (KAP) *The Big Four* yaitu *Price Waterhouse Cooper (PWC)*, *Deloitte Touche Tohmatsu*, *KPMG*, *Ernst & Young (E&Y)* dan sebanyak 96 data observasi diaudit oleh non-kantor akuntan publik (KAP) *The Big Four*.

Variabel komite audit (KOA) memiliki rata-rata modus yaitu 3 dengan nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 5. Hal ini menunjukkan bahwa sampel yang diteliti telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI tentang pelaksanaan *good corporate governance* yang menyatakan bahwa jumlah komite audit minimal tiga orang.

Variabel kontrol *return on asset* (ROA) memiliki nilai minimum sebesar 0,0000 dan nilai maksimum sebesar 0,6572. Sementara nilai *mean* adalah 0,1196 hal ini menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya adalah 11,96%.

Variabel kontrol ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai minimum sebesar 25,2627 dan nilai maksimum sebesar 33,0950 dengan nilai *mean* sebesar 28,3335. Hal ini menunjukkan rata-rata perusahaan pada sampel yang diteliti memiliki $\ln(\text{total aset})$ sebesar 28,3335.

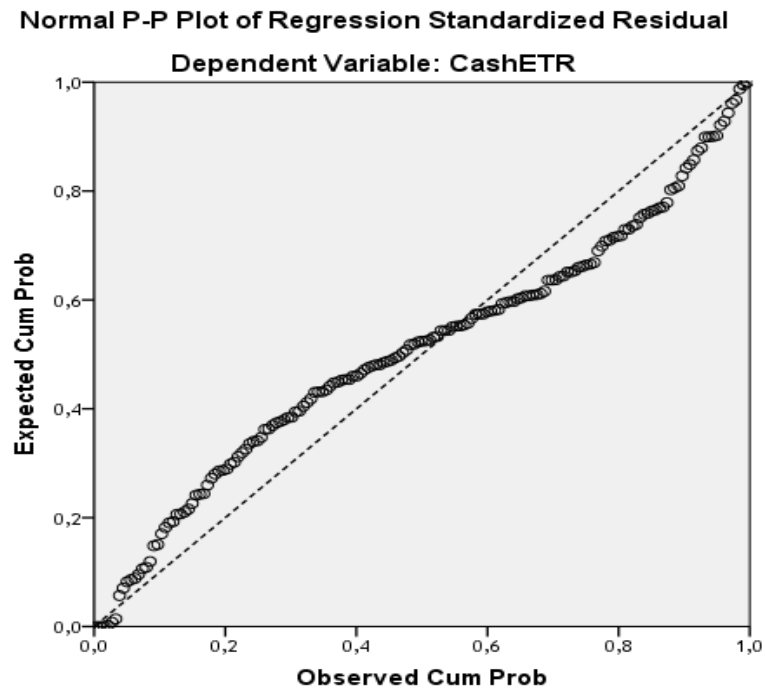
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam melakukan analisis regresi. Persyaratan tersebut terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 20.

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi data yang digunakan, variabel dependen dan variabel independen berdistribusi normal atau mendekati normal. Pengujian ini dilakukan dengan analisis grafik Normal P-P Plot dan *Kolmogorov-Smirnov Test*.

Gambar 4.1
Normal P-P Plot



Tabel 4.3

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test

Kolmogorov-Smirnov	Asymp. Sig
1,339	0,056

Pada gambar 4.1 terlihat bahwa variabel *tax avoidance* (*cash ETR*) terdistribusi mendekati normal, karena titik titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov Test* pada tabel 4.3 terlihat bahwa nilai *asymptotic significance* adalah 0,056 yang berarti lebih besar dari 0,05. Dengan demikian hasil ini memperkuat analisis grafik normal P-P plot bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan semua variabel independen memiliki nilai VIF kecil dari 10.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Dependent Variabel <i>Cash ETR</i>	
	Tolerance	VIF
KI	0,864	1,158
PDKI	0,919	1,088
KuA	0,557	1,797
KoA	0,807	1,239
ROA	0,708	1,412
SIZE	0,692	1,445

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa variabel independen yaitu kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan kualitas audit yang menggunakan variabel dependen *tax avoidance (cash ETR)* semuanya memenuhi syarat bebas multikolinearitas dimana nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan tidak ada nilai VIF yang lebih besar dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada regresi yang digunakan dalam penelitian tidak terdapat permasalahan multikolinearitas atau tidak terdapat korelasi yang kuat antara sesama variabel independen dan juga sesama variabel kontrol.

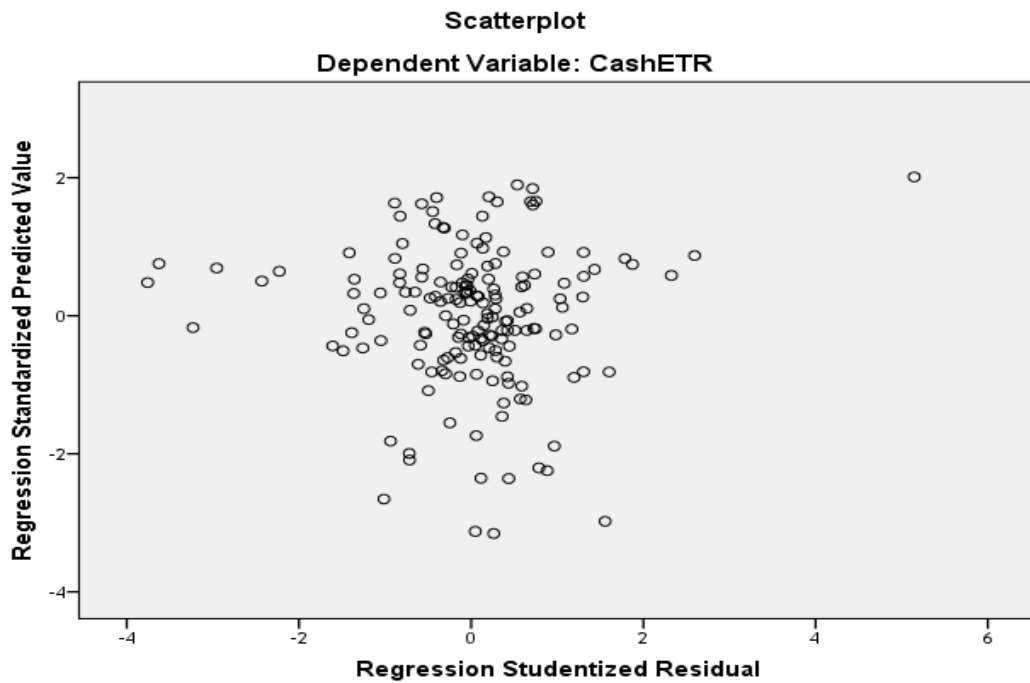
4.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan memiliki perbedaan *variance* dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lain. Dalam penelitian ini digunakan model pengujian *scatterplots* regresi, dimana terdapat titik-titik dalam satu diagram. Semakin mendekati garis 0 (nol) di dalam diagram tersebut maka data tersebut terbebas dari masalah heterokedastisitas. Adapun pola *scatterplots* dari model regresi data adalah sebagai berikut :

Gambar 4.2

Diagram Scatterplots



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa terdapat pola yang tidak beraturan di dalam diagram tersebut, namun menyebar disepanjang garis 0 (nol) sumbu Y. Maka berdasarkan aturan *scatterplots* model regresi data tidak mengalami heteroskedastisitas.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini digunakan uji *Durbin-Watson* dalam memeriksa adanya autokorelasi atau hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.5
Hasil Uji Durbin- Watson Statistics

Model	R Square	Adjusted R Square	Durbin- Watson
1	0,107	0,075	1,724

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai *Durbin-Watson* adalah 1,724 yang berarti terletak antara -2 sampai +2, sehingga dapat diartikan bahwa pada model regresi yang dibentuk tidak terdeteksi adanya autokorelasi .

4.4 Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil dari uji asumsi klasik yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi heterokedastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi maka analisis regresi berganda dapat dilakukan. Tujuan analisis regresi berganda adalah untuk memperkirakan perubahan respon pada variabel dependen terhadap beberapa variabel independen. Hasil analisis regresi berganda disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.6
Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	B	t	Sig
----------	---	---	-----

Constant	0,457	7,286	0,000
KI	-0,001	-,0,082	0,934
PDKI	0,016	0,494	0,622
KuA	0,024	2,783	0,006
KoA	-0,022	-2,739	0,007
ROA	-0,078	-2,078	0,039
SIZE	-0,005	-2,267	0,025
R Square	0,107		
Adj. R Square	0,075		
F	3,291		
Sig. (F)	0,004		
Keterangan : Cash ETR = cash effective tax rate; KI = kepemilikan institusional; PDKI = proporsi dewan komisaris independen; KuA = kualitas audit; KoA = komite audit; ROA=return on asset; SIZE = ukuran perusahaan			

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi berganda dapat dituliskan sebagai berikut.

$$\text{Cash ETR} = 0,457 - 0,001\text{KI} + 0,016 \text{PDKI} + 0,024\text{KuA} - 0,022\text{KoA} - 0,730\text{ROA} - 0,005\text{SIZE} + e$$

Persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

1. Nilai konstanta bertanda positif sebesar 0,457 artinya apabila nilai variabel independen; KI, PDKI, KuA, KoA, ROA dan SIZE bernilai konstan (memiliki nilai nol), maka *tax avoidance* (cash ETR) mengalami kenaikan sebesar sebesar 0,457.

2. Koefisien kepemilikan institusional (KI) bertanda negatif sebesar 0,001 memiliki pengertian jika diasumsikan variabel independen lainnya konstan dan kepemilikan institusional mengalami kenaikan sebesar 1%, maka mengakibatkan penurunan penghindaran pajak (*cash ETR*) sebesar 0,001.
3. Koefisien proporsi dewan komisaris independen (PDKI) bertanda positif sebesar 0,016 memiliki pengertian jika diasumsikan variabel independen lainnya konstan dan PDKI mengalami kenaikan sebesar 1%, maka penghindaran pajak (*cash ETR*) mengalami kenaikan sebesar 0,016.
4. Koefisien kualitas audit (KuA) bertanda positif 0,024 apabila variabel independen lainnya konstan maka persamaan regresinya $Cash ETR = 0,457 + 0,024 KuA$. Artinya rata-rata penghindaran pajak oleh KAP *Big Four* adalah $0,457 + 0,024 = 0,481$ dan KAP *Non Big Four* = 0,457. Dengan demikian dapat disimpulkan penghindaran pajak KAP *Big Four* lebih besar dibandingkan KAP *Non Big Four*.
5. Koefisien komite audit (KoA) bertanda negatif sebesar 0,022 memiliki pengertian jika diasumsikan variabel independen lainnya konstan dan komite audit mengalami kenaikan sebesar 1%, maka penghindaran pajak (*cash ETR*) mengalami penurunan sebesar 0,022.
6. Koefisien *return on asset* (ROA) bertanda negatif sebesar 0,738 memiliki pengertian jika diasumsikan variabel independen lainnya konstan dan ROA mengalami kenaikan sebesar 1%, maka penghindaran pajak (*cash ETR*) mengalami penurunan sebesar 0,738.
7. Koefisien ukuran perusahaan (SIZE) bertanda negatif sebesar 0,005 memiliki pengertian jika diasumsikan variabel independen lainnya konstan

dan SIZE mengalami kenaikan sebesar 1%, maka penghindaran pajak (*cash ETR*) mengalami penurunan sebesar 0,005.

4.5 Hasil Uji Hipotesis

4.5.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji ini digunakan untuk mengetahui kemampuan keseluruhan variabel independen yang digunakan pada model regresi dalam menjelaskan variansi nilai variabel dependen.

Pada tabel 4.6 diketahui bahwa nilai *adjusted Rsquare* sebesar 0,075. Hal ini berarti 7,5 % penghindaran pajak (*cash ETR*) yang dilakukan perusahaan dipengaruhi oleh variabel kepemilikan institusional (KI), proporsi dewan komisaris independen (PDKI), kualitas audit (KuA), komite audit (KoA), ROA dan SIZE. Sedangkan sisanya sebesar 92,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

4.5.2 Hasil Uji F

Analisis hasil uji F digunakan untuk melakukan uji hipotesis koefisien regresi secara bersamaan, apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan F lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dari hasil pengujian *F-statistic* diperoleh hasil yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,004 dan nilai tersebut lebih kecil dari $\alpha = 5\%$, sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi penghindaran pajak (*cash ETR*) perusahaan atau bisa dikatakan terdapat pengaruh antara variabel kepemilikan institusional (KI), proporsi dewan komisaris independen (PDKI),

kualitas audit (KuA), komite audit (KoA), ROA dan SIZE secara simultan terhadap penghindaran pajak (*cash ETR*).

4.5.3 Hasil Uji t

Uji t dilakukan untuk menghitung koefisien regresi secara parsial untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

4.5.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil regresi, variabel kepemilikan institusional memiliki nilai koefisien sebesar 0,001 dengan tingkat signifikansi sebesar -0,934. Jika menggunakan α sebesar 5 %, maka nilai signifikansi dari variabel kepemilikan institusional lebih besar dari α . Hal ini menunjukkan KI tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak tidak dapat didukung oleh data sehingga hipotesis (H1) tidak bisa diterima.

4.5.3.2 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil regresi variabel PDKI memiliki nilai koefisien sebesar -0,016 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,622. Jika menggunakan $\alpha = 5\%$, maka nilai signifikansi dari variabel PDKI lebih besar dari α . Hal ini menunjukkan PDKI tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak tidak didukung oleh data. Berdasarkan hasil tersebut, maka keputusan hipotesis (H2) tidak bisa diterima.

4.5.3.3 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil regresi variabel kualitas audit memiliki nilai koefisien sebesar 0,024 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,006. Jika menggunakan $\alpha = 5\%$, maka nilai signifikansi dari variabel KuA lebih kecil dari α . Hal ini menunjukkan kualitas audit secara statistik mempunyai hubungan terhadap penghindaran pajak dapat didukung oleh data. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis (H3) gagal ditolak.

4.5.3.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil regresi variabel komite audit memiliki nilai koefisien sebesar -0,022 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,007. Jika menggunakan $\alpha = 5\%$, maka nilai signifikansi dari variabel komite audit lebih kecil dari α . Hal ini menunjukkan komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan dapat didukung oleh data. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis (H4) gagal ditolak.

Tabel 4.7

Ringkasan Hasil Penelitian

	Pernyataan Hipotesis	Keputusan
H1	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak	Tidak bisa diterima
H2	Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak	Tidak bisa diterima
H3	Kualitas audit diduga mempunyai hubungan dengan penghindaran pajak	Gagal ditolak
H4	Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak	Gagal ditolak

4.6 Pembahasan

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa kepemilikan institusional (KI) dan proporsi dewan komisaris independen (PDKI) tidak berpengaruh secara

statistik terhadap penghindaran pajak sedangkan kualitas audit (KuA), komite audit (KoA), *return on asset* (ROA) dan ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh secara statistik terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional (KI) tidak berpengaruh secara statistik terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak ditentukan oleh variabel kepemilikan institusional. Dengan kata lain tinggi atau rendahnya persentasi saham yang dimiliki institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang diterbitkan atau saham yang beredar tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku penghindaran pajak. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) dan Winata (2013) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional dan *tax avoidance*. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank kecuali kepemilikan individual. Pemilik institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan namun pemilik institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan tersebut kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas dewan komisaris yang mewakili pemilik institusional. Akan tetapi ada atau tidaknya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan tetap saja akan terjadi penghindaran pajak.

Proporsi dewan komisaris independen (PDKI) tidak berpengaruh secara statistik terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak ditentukan oleh variabel proporsi dewan komisaris independen. Dengan kata lain tinggi atau

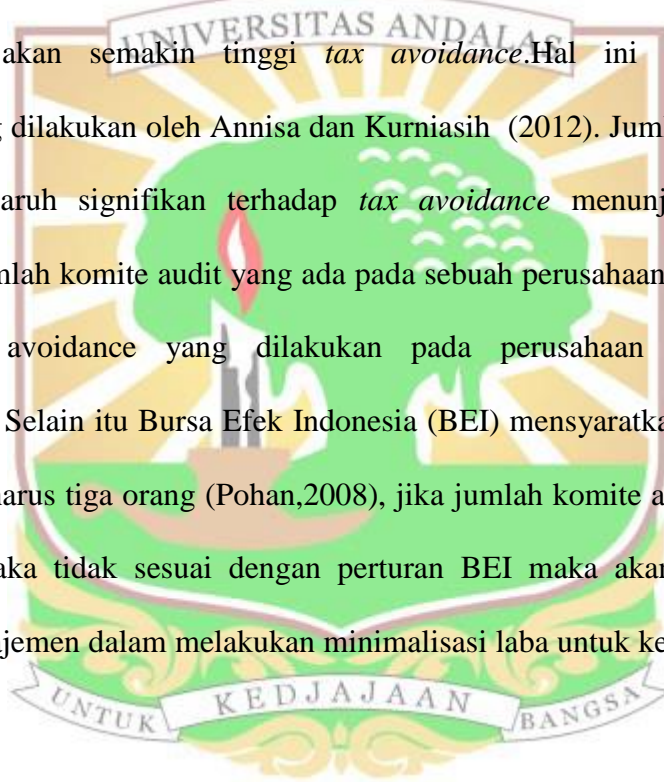
rendahnya persentasi proporsi dewan komisaris independen yang dimiliki institusi dibandingkan dengan jumlah komisaris yang ada tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyatakan tidak ada pengaruh proporsi dewan komisaris independen dengan *tax avoidance*. Hal serupa juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhila (2014), menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan mengapa besarnya proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pertama, tidak semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.

Kedua, kemampuan komisaris independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikan dewan komisaris independen kurang tanggap dalam memperhatikan ada atau tidaknya penghindaran pajak perusahaan sehingga melalaikan kewajibannya kepada negara.

Kualitas audit (KuA) secara statistik mempunyai hubungan dengan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya variabel penghindaran pajak (*tax avoidance*) ditentukan oleh kualitas audit. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih. Jika nominal pajak yang harus dibayar terlalu tinggi biasanya akan memaksa perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak, maka semakin berkualitas audit suatu

perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Chai dan Liu, 2010).

Komite audit (KoA) secara statistik dan arah negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) ditentukan oleh komite audit. Dengan kata lain, apabila semakin banyak jumlah anggota komite audit maka akan semakin rendah *tax avoidance*. Namun sebaliknya, apabila semakin sedikit jumlah anggota komite audit maka akan semakin tinggi *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012). Jumlah komite audit yang berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* menunjukkan semakin banyaknya jumlah komite audit yang ada pada sebuah perusahaan dapat membuat praktek *tax avoidance* yang dilakukan pada perusahaan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu Bursa Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan paling sedikit komite audit harus tiga orang (Pohan, 2008), jika jumlah komite audit kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Pohan, 2008).



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2014. Untuk pengukuran penghindaran pajak (*tax avoidance*) digunakan *cash ETR*. Proksi tata kelola perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya persentase saham yang dimiliki institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang diterbitkan atau saham yang beredar tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku penghindaran pajak.
2. Proporsi dewan komisaris independen (PDKI) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya persentase proporsi dewan komisaris independen yang dimiliki institusi dibandingkan dengan jumlah komisaris yang ada tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku penghindaran pajak.
3. Kualitas audit (KuA) secara statistik mempunyai hubungan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti semakin berkualitas audit suatu perusahaan,

maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan.

4. Komite audit (KoA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti apabila semakin banyak jumlah anggota komite audit maka akan semakin rendah *tax avoidance*. Namun sebaliknya, apabila semakin sedikit jumlah anggota komite audit maka akan semakin tinggi *tax avoidance*.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur saja sebagai sampel, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisir untuk jenis industri lainnya.
2. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel yaitu kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit dan komite audit. Masih banyak variabel lain yang mempengaruhi *tax avoidance*.

5.3 Saran

Penulis berharap penelitian ini dapat mendorong adanya penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan *tax avoidance*. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya dapat menguji penelitian ini menggunakan sampel pada industri lainnya seperti pertambangan, agrikultur dan jasa.

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan pengukuran lain dalam mengukur *tax avoidance*. Misalnya dengan pengukuran *book tax difference*, *effective tax rate* dan *current effective tax rate*.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen yang terkait dengan *tax avoidance*, karena penelitian ini R square masih kecil.



DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. 2012. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi & Auditing, Vol.8, 95 - 189.
- Budiman, J., & Setiyono. 2012. *Pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin 25-28 September 2012.
- Bovi, Maurizio. 2005. *Book-Tax Gap, An Income Horse Race*. Working Paper No. 61, Desember 2005.
- Cadbury Committee. 1992. *Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance*. London: Gee.
- Chai, H, dan Liu, Q. 2010. Competition and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Chinese Industrial Firms. www.ssrn.com.
- Chen,S., Chen,X., Cheng, Q., Shevlin, T. 2010. *Are Family Firms More Tax Avoidance Aggressive Than Non-Family Firms?*. Journal of Financial Economics. 95, pg 41-61.
- Chen, K. P, dan Chu, C. Y. C. 2010. *Internal Control vs External Manipulation: A Model of Corporate Income Tax Evasion*. Rand Journal of Economics.
- Damayanti, Fitri dan Susanto, Tridatius. 2015. *Pengaruh Komite audit, Kepemilikan Institusional, Resiko Perusahaan dan Return on Asset terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi. Volume 5 No 2.
- De Angelo, L.E. 1981. Auditor Size and Audit Quality. Journal of Accounting and Economics.
- Desai, M.A. & Dharmapala, D. 2007. *Taxation and Corporate Governance: An Economic Approach*. Harvard University, working paper. SSRN.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati. 2014. “*Pengaruh Karakter Ekdektif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia*”. ISSN: 2302-8556. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.2 (2014):249-260.
- Dyreng, Scott D.; Hanlon, Michelle; Maydew Edward L, 2008. *Long-Run Corporate Tax Avoidance*. The Accounting Review, 83, 61-82.
- Dyreng, Scott D.; Hanlon, Michelle; Maydew Edward L, 2010. *The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance*. The Accounting Review, 85, 1163-1189.

- Fadhila, Rahmi. 2014. *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011)*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- FCGI. 2001. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Jilid II. Jakarta: Citra Graha.
- Friese, A., S. Link, dan S. Mayer. 2006. *Taxation and Corporate Governance*. Working Paper.
- Gujarati, D. N. 2003. *Basic Economics*. Fourth Edition. McGraw Hill.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariante dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hardika, Nyoman Sentosa. 2007. *Perencanaan Pajak: sebagai Strategi Penghematan Pajak*. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. Volume 3 No.2. 103-112.
- Hanum, Hashemi Rodhian dan Zulaikha. 2013. *Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate*. *Diponegoro Journal of Accounting*. 2 : 1-10.
- Haruman, Tendi. 2008. *Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan: Survey pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XI*. 23-24 Juli 2008, Pontianak.
- Irawan, Hendra dan Aria F. 2012. *Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak Perusahaan*. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin 20-23 September 2011*.
- Khurana, Inder dan Willian Moser. 2009. *Shareholder investment horizons and tax aggressiveness*. Available at SSRN 1517913.
- Kim, Li, Li*. 2010. *Corporate Tax Avoidance and Bank Loan Contracting*. www.ssrn.com
- Kim, Li, dan Zhang. 2010. *Corporate Tax Avoidance and Stock Price Crash Risk: Firm-Level Analysis*. www.ssrn.com
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: KNKG.
- Linda, Maryasih, Lilis dan Nuraini. 2011. *"Komite Audit dan Kinerja Perusahaan: Agency Theory atau Stewardship Theory?"*. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*. Aceh.

- Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*. Edisi revisi., Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya dan Ketut Alit Suardana. 2014. *Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif Tax Avoidance*. Perusahaan Manufaktur. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN: 2302-8556.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mayangsari, Sekar. 2003. *Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, serta Mekanisme Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan*. Simposium Nasional Akuntansi VI. 16-17 Oktober 2003. Surabaya.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2014. *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram.
- Republik Indonesia, Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 tentang *Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____, Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang *Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Richardson, G., dan Lanis, R. 2007. *Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia*. Journal of Accounting and Public Policy, 26 (2007), 689-704.
- Sartori, Nicola. 2010. *Effect of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance*. www.ssrn.com
- Siahaan, Hinsa. 2004. *Teori Optimalisasi Struktur Modal dan Aplikasinya di dalam Memaksimalkan Nilai Perusahaan*. Jurnal Keuangan dan Moneter. Volume 7 No. 1.
- Siallagan, Hamongan dan Machfoedz, Mas'ud. 2006. *Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
- Suandy, Erly. 2001. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Watts, R L and Zimmerman, J L. 1986. *Positive Accounting Theory*. New Jersey: Prentice-Hall International Inc.

Winata, Fenny. 2014. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013.*” *Taxand Accounting Review* Vol.4 No.1.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Sampel Penelitian

No	Kode	Nama Perusahaan
1	AISA	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
2	ALDO	PT Alkindo Naratama Tbk
3	AMFG	PT Asahimas Flat Glass Tbk
4	ARNA	PT Arwana Citra Mulia Tbk
5	ASII	PT Astra International Tbk
6	AUTO	PT Astra Otoparts Tbk
7	BATA	PT Sepatu Bata Tbk
8	BTON	PT Bentojaya Manunggal Tbk
9	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
10	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
11	DLTA	PT Delta Djakarta Indonesia Tbk
12	DPNS	PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk
13	DVLA	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
14	EKAD	PT Ekadharma International Tbk
15	GGRM	PT Gudang Garam Tbk
16	GJTL	PT Gajah Tunggal Tbk
17	HMSP	PT HM Sampoerna Tbk
18	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
19	IGAR	PT Champion Pasific Indonesia Tbk
20	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
21	INDS	PT Indospring Tbk
22	INTP	PT Indocement Tunggul Prakasa
23	ISSP	PT Steel Pipe Industry
24	JECC	PT Jembo Cable Company Tbk
25	JPFA	PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
26	KAEF	PT Kimia Farma (Persero) Tbk
27	KBLI	PT KMI Wire and Cable Tbk
28	KBLM	PT Kabelindo Murni Tbk
29	KDSI	PT Kedawung Setia Industrial
30	KIAS	PT Keramik Indonesia Asosiasi Tbk
31	KICI	PT Kedaung Indah Can Tbk
32	LION	PT Lion Metal Works Tbk
33	MBTO	PT Martina Berto Tbk
34	MERK	PT Merck Tbk
35	MLBI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
36	MYOR	PT Mayora Tbk

37	NIPS	PT Nippres Tbk
38	PICO	PT Pelangi Indah Canindo Tbk
39	PYFA	PT Pyrdam Farma Tbk
40	ROTI	PT Nippon Indosari Corporindo Tbk
41	SCCO	PT Sucaco Tbk
42	SIDO	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
43	SKMB	PT Sekar Bumi Tbk
44	SKLT	PT Sekar Laut Tbk
45	SMCB	PT Holcim Indonesia (Persero) Tbk
46	SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
47	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk
48	SQBB	Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
49	STTP	PT Siantar Top Tbk
50	TALF	PT Tunas Alfin Tbk
51	TCID	PT Mandom Indonesia Tbk
52	TOTO	PT Sutya Toto Indonesia Tbk
53	TRIS	PT Trisula International Tbk
54	TSPC	PT Tempo Scan Pasific Tbk
55	ULTJ	PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk
56	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk
57	WIIM	PT Wismilak Inti Mkmur Tbk



Lampiran 2

Hasil Statistik Deskriptif

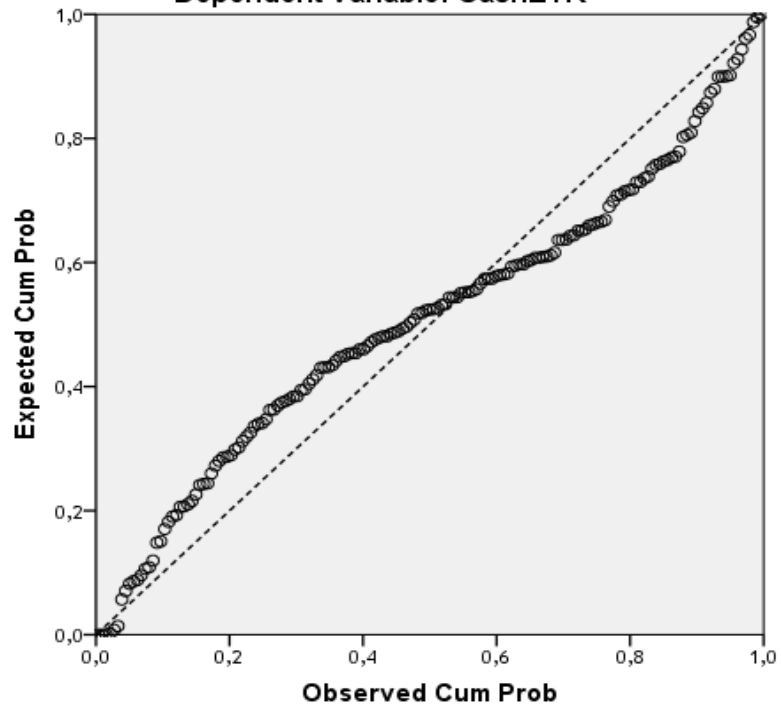
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CashETR	171	,1009	,4868	,248644	,0434575
KI	171	,1438	,9975	,579159	,2315530
PDKI	171	,2000	,8000	,378950	,1008584
KUA	171	,0000	1,0000	,438596	,4976726
KOA	171	2,0000	5,0000	3,128655	,4417185
ROA	171	,0000	,6572	,119587	,1010188
SIZE	171	25,2767	33,0950	28,333508	1,6969250
Valid N (listwise)	171				

Lampiran 3

Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: CashETR



Lampiran 4

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		171
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,04105585
Most Extreme Differences	Absolute	,102
	Positive	,097
	Negative	-,102
Kolmogorov-Smirnov Z		1,339
Asymp. Sig. (2-tailed)		,055

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 5

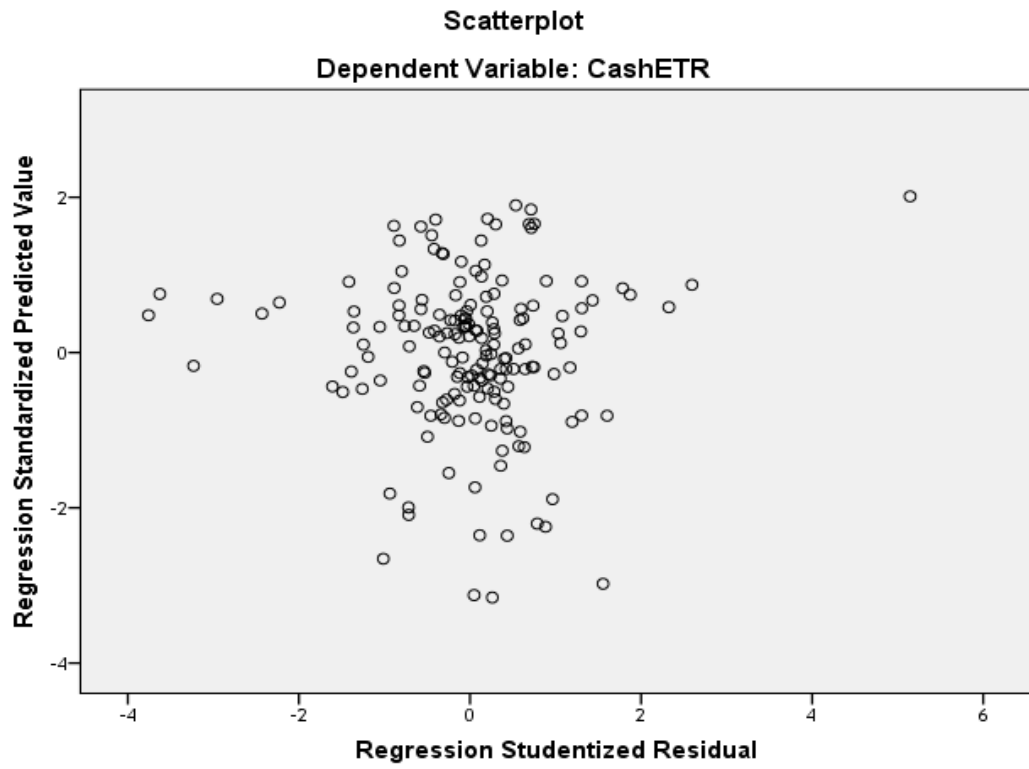
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KI	,864	1,158
	PDKI	,919	1,088
	KUA	,557	1,797
	KOA	,807	1,239
	ROA	,708	1,412
	SIZE	,692	1,445



Lampiran 6

Hasil Uji Heterokedastisitas



Lampiran 7

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Square Change	F Change
1	,328^a	,107	,075	,0418001	,107	3,291

Model Summary^b

Model	Change Statistics			Durbin-Watson
	df1	df2	Sig. F Change	
1	6^a	164	,000	1,724

a. Predictors: (Constant), SIZE, PDKI, KI, ROA, KOA, KUA

b. Dependent Variable: CashETR

Lampiran 8

Hasil Regresi Berganda

Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,457	,063		7,286	,000
	KI	-,001	,015	-,007	-,082	,934
	PDKI	,016	,033	,038	,494	,622
	KUA	,024	,009	,275	2,783	,006
	KOA	-,022	,008	-,225	-2,739	,007
	ROA	-,078	,038	-,182	-2,078	,039
	SIZE	-,005	,002	-,201	-2,267	,025

a. Dependent Variable: CashETR